

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan Di Kabupaten Kepahiang

¹Tere Aderempas, ²Lukman Asha, ³Emmi Kholilah Harahap

¹Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

³Institut agama islam negeri curup, Indonesia

¹tereadereempas238@gmail.com, ²Lukman.Asha@iaincurup.ac.id,

³emmiharahap57@gmail.com

Tanggal Submit: 08-08-2025 Tanggal diterima: 01-09-2025 Tanggal Terbit: 13-09-2025

Abstrak: Pemerataan infrastruktur pendidikan menjadi syarat utama terciptanya keadilan dan kualitas pendidikan, namun di Kabupaten Kepahiang masih terdapat ketimpangan sarana seperti ruang kelas, listrik, air bersih, dan internet. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan daerah dalam pemerataan infrastruktur pendidikan serta dampaknya terhadap akses dan mutu layanan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan mencakup pembangunan ruang kelas, penyediaan fasilitas dasar, dan distribusi bantuan infrastruktur, tetapi ketimpangan antarwilayah dan keterbatasan akses di daerah terpencil masih ada. Kesimpulannya, pemerataan infrastruktur pendidikan belum optimal sehingga diperlukan perencanaan berbasis kebutuhan lokal, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan.

Kata Kunci: *Infrastruktur pendidikan, pemerataan, kebijakan daerah, akses pendidikan, kualitas pembelajaran.*

Abstract: Equitable educational infrastructure is essential to achieve justice and quality education; however, disparities remain in Kepahiang Regency, particularly in classrooms, electricity, clean water, and internet access. This study aims to analyze the implementation of local government policies in ensuring equity of educational infrastructure and their impact on access and service quality. This research employs a descriptive qualitative method with interviews, observations, and documentation. The findings show that policies include classroom construction, provision of basic facilities, and distribution of infrastructure assistance, yet regional disparities and limited access in remote areas persist. The study concludes that equity in educational infrastructure has not been fully achieved, thus requiring need-based planning, cross-sector collaboration, and continuous evaluation.

Keywords: *Educational infrastructure, equity, local policy, education access, learning quality.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah berkewajiban membiayainya. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi juga menjadi pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial, mobilitas ekonomi, dan kemajuan peradaban bangsa. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan.¹ Pemerataan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam menciptakan keadilan akses pendidikan.²

Kesenjangan infrastruktur pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek fisik semata, tetapi turut memengaruhi kualitas proses pembelajaran, semangat belajar peserta didik, serta kinerja tenaga pendidik.³ Ketika satuan pendidikan tidak didukung dengan sarana yang memadai seperti ruang belajar yang layak, akses internet, peralatan laboratorium, serta fasilitas sanitasi maka pembelajaran menjadi tidak efektif, dan secara tidak langsung menciptakan ketimpangan hasil belajar antarwilayah. Hal ini menghambat terwujudnya prinsip *equal opportunity* dalam pendidikan sebagaimana dicita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerataan infrastruktur pendidikan di Indonesia didasarkan pada berbagai kebijakan nasional, dengan UU No. 20 Tahun 2003 sebagai landasan utama yang menjamin hak pendidikan bermutu, adil, dan merata. UU No. 23 Tahun 2014 mempertegas kewajiban daerah dalam penyediaan infrastruktur sekolah, sedangkan Perpres No. 87 Tahun 2017 menekankan pentingnya sarana pendukung pendidikan karakter. Dalam RPJMN 2020–2024, prioritas diberikan pada pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sekolah baru di daerah 3T. Permendikbud No. 16 Tahun 2021 serta Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 mengatur teknis DAK Fisik dan standar minimal infrastruktur pendidikan. Selain itu, Inpres No. 9 Tahun 2020 fokus pada percepatan pembangunan di Papua, sementara Program Sekolah Penggerak mendorong transformasi pendidikan berbasis infrastruktur dan teknologi di wilayah yang masih terbatas fasilitasnya.⁴ Meskipun kebijakan pendidikan nasional telah mencakup berbagai dimensi, implementasinya masih menghadapi berbagai

¹ object Object, "Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk) Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur," accessed April 18, 2025, <https://core.ac.uk/reader/287347140>.

² Fadhil Mubarak, "Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog: Meta Analisis Pendekatan Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, Dan Ibnu Khaldun," *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (May 30, 2023): 11–33, <https://doi.org/10.33474/ja.v5i1.19869>.

³ Maharani et al., "Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia."

⁴ Kemendikbud. Kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan indonesia. 2025. <https://www.kemdikbud.go.id/>. (dikases 18 april 2025)

tantangan besar. Implementasi kebijakan di daerah seringkali belum mengedepankan prinsip keadilan spasial dan kontekstual.⁵ Realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup mencolok dalam pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan karakteristik geografis yang menantang, seperti Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.⁶

Laporan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam peningkatan layanan. Pembangunan sekolah baru dilakukan di lima sekolah dengan anggaran Rp2,5 miliar dan capaian 100 persen, sementara rehabilitasi 12 SD menelan Rp1,8 miliar dengan progres 90 persen. Renovasi sanitasi di delapan sekolah mendapat Rp750 juta dengan capaian 85 persen, sedangkan penyediaan teknologi pendidikan untuk 15 sekolah menghabiskan Rp1,2 miliar dengan capaian 95 persen. Perbaikan atap dan dinding di sepuluh sekolah menelan Rp1,5 miliar namun baru mencapai 80 persen. Selain itu, penambahan ruang kelas baru di enam sekolah menelan Rp2 miliar dan telah rampung 100 persen.⁷

Ketersediaan dan kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang juga menjadi perhatian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang mencatat terdapat 103 Sekolah Dasar (SD) dan 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut. Namun, sekitar 20% dari sekolah-sekolah tersebut memerlukan perbaikan untuk memenuhi standar pelayanan pendidikan yang layak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah ini mencakup keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, serta minimnya tenaga pengajar di daerah terpencil.⁸

Data tahun 2024 mencatat jumlah sekolah di Kabupaten Kepahiang terdiri dari 103 SD, 30 SMP, serta 25 SMA/SMK. Dari total tersebut, sebagian sekolah masih membutuhkan perbaikan infrastruktur. Pada jenjang SD, sekitar 20 persen sekolah memerlukan rehabilitasi ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan sarana pendukung lainnya. Di tingkat SMP, 18 persen sekolah mengalami keterbatasan infrastruktur, sementara pada SMA/SMK persentasenya lebih rendah yakni 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sekolah memiliki infrastruktur layak, kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana pendidikan masih signifikan, terutama pada jenjang SD yang jumlahnya paling besar.⁹

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan, pemerintah daerah Kabupaten Kepahiang telah menetapkan 16 program prioritas

⁵ Gaol, "Pendekatan Strategis dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh di Kabupaten Muna."

⁶ Gatot Suprasetya, "Optimalisasi Tata Kelola Pembangunan Di Daerah Otonomi Baru (Dob) Papua Guna Menjaga Keutuhan Nkri," n.d.

⁷ BPS Kepahiang. Statistik Kesejahteraan Rakyat. 2025. <https://kepahiangkab.bps.go.id/id> (diakses 17 Maret 2025).

⁸ Nani, "Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)."

⁹ Pemkab Kepahiang. Jumlah Sekolah dan Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Kepahiang. 2024. <https://kepahiangkab.go.id/> (diakses 25 Maret 2025).

untuk periode 2025–2030, salah satunya adalah peningkatan infrastruktur dasar di bidang pendidikan (Pemkab Kepahiang, 2024). Program ini diharapkan dapat mengatasi disparitas infrastruktur pendidikan antarwilayah dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepahiang. Meskipun sudah ada upaya peningkatan, tantangan pemerataan infrastruktur pendidikan masih terlihat dari ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi digital.¹⁰

Perbandingan fasilitas sekolah antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Pada jenjang sekolah dasar, sebanyak 85 persen sekolah di perkotaan telah memiliki laboratorium, sedangkan di wilayah pedesaan hanya 45 persen yang memiliki fasilitas serupa. Kondisi yang sama terlihat pada tingkat sekolah menengah pertama, di mana 90 persen sekolah di perkotaan telah dilengkapi perpustakaan, sementara di pedesaan persentasenya baru mencapai 50 persen. Pada jenjang sekolah menengah atas, akses internet menjadi indikator yang paling menonjol perbedaannya, dengan 95 persen sekolah di perkotaan sudah terkoneksi, sementara di pedesaan hanya 55 persen. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan nyata antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, yang berimplikasi terhadap perbedaan kualitas layanan pendidikan serta peluang belajar siswa.¹¹

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih berada dalam kondisi yang tidak layak, dengan bangunan yang rusak, kekurangan ruang kelas, serta minimnya fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat peraga pendidikan. Kondisi ini menghambat proses belajar mengajar dan menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Selain itu, akses terhadap teknologi pendidikan, seperti komputer dan internet, sangat terbatas di banyak sekolah, sehingga siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar menggunakan teknologi modern.¹² Kabupaten Kepahiang, sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu, menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur pendidikan. Di sisi kebijakan, keterbatasan anggaran dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sering kali menghambat implementasi program-program pendidikan.¹³

Alokasi anggaran pendidikan Kabupaten Kepahiang tahun 2023 menunjukkan komitmen peningkatan mutu layanan melalui program strategis. Pada jenjang SD, Rp1,2 miliar digunakan untuk rehabilitasi bangunan, sedangkan SMP mendapat Rp800 juta untuk pembangunan ruang kelas baru dan fasilitas umum. Program beasiswa bagi

¹⁰ Ahmad Subair, "Sejarah Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi," no. 5 (2024).

¹¹ Pemkab kepahiang. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten kepahiang. 2023. <https://kepahiangkab.go.id/> (diakses 25 Maret 2025).

¹² Qaulan Raniyah, "Peran Teknologi dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan" 3 (2024).

¹³ Tashakkori and Teddlie, *SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd Edition)*.

keluarga kurang mampu dialokasikan Rp600 juta, sementara pelatihan guru mendapat Rp450 juta untuk peningkatan kualitas pendidik. Sarana teknologi pendidikan memperoleh Rp500 juta, diikuti pengadaan buku dan alat tulis Rp300 juta, serta dukungan literasi, numerasi, dan ekstrakurikuler sebesar Rp450 juta. Distribusi anggaran ini menggambarkan keseimbangan antara pembangunan fisik, peningkatan SDM, dan layanan pendukung siswa.¹⁴

Meskipun anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membayar gaji guru dan staf administratif, sehingga dana yang tersisa untuk program pemerataan infrastruktur pendidikan sangat terbatas. Selain itu, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah menyebabkan program-program yang dirancang untuk mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan sering kali tidak berjalan efektif atau tidak tepat sasaran.¹⁵

Pada tahun 2024, Kabupaten Kepahiang menerima DAK Fisik bidang pendidikan sebesar Rp14,5 miliar yang dialokasikan ke berbagai jenjang dan fasilitas pendukung. PAUD memperoleh Rp1,2 miliar untuk penyediaan sarana prasarana, sementara SD mendapat alokasi terbesar Rp5,5 miliar untuk pembangunan, rehabilitasi, dan fasilitas dasar. SMP menerima Rp3,8 miliar, SMA Rp2 miliar, dan SMK Rp1,5 miliar guna mendukung layanan pendidikan menengah. Selain itu, fasilitas perpustakaan mendapat dana Rp500 juta sebagai penunjang literasi. Distribusi ini menunjukkan prioritas pada penguatan pendidikan dasar sekaligus kesinambungan layanan pendidikan menengah dan fasilitas pendukung.¹⁶

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pengalokasian anggaran pendidikan harus diperhatikan.¹⁷ Berdasarkan APBD 2024, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Kepahiang sebesar 18%, masih di bawah standar nasional 20%. Namun, kebijakan pendidikan periode 2019–2023 menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari peningkatan APK di semua jenjang: SD naik dari 98,5% menjadi 99,7%, SMP dari 85,4% menjadi 89,7%, dan SMA dari 78,2% menjadi 83%. Rasio guru-siswa membaik dari 1:25 menjadi 1:23, sementara rehabilitasi SD meningkat dari 5 sekolah pada 2019 menjadi 15 sekolah pada 2023. Angka putus sekolah SD menurun dari 0,5% menjadi 0,2%, disertai kenaikan anggaran dari Rp50 miliar menjadi Rp60 miliar serta peningkatan peserta pelatihan guru dari 200 menjadi 350. Penyediaan komputer juga bertambah signifikan dari 50 unit menjadi 150 unit, menunjukkan kebijakan pendidikan berdampak pada peningkatan akses, kualitas, dan sarana pendukung.¹⁸

Kondisi ini menegaskan pentingnya reformulasi pendekatan implementasi kebijakan pendidikan yang lebih berbasis data, kebutuhan lokal, serta mengedepankan

¹⁴ Pemkab Kepahiang. RKPD Kabupaten Kepahiang 2023. 2025. <https://kepahiangkab.go.id/>

¹⁵ Darling-Hammond, *Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence*.

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.

¹⁷ Nani, "Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)."

¹⁸ BPS Kepahiang. Hasil Kebijakan Program Pendidikan Kabupaten Kepahiang 2019-2023. 2025. <https://kepahiangkab.bps.go.id/id> (diakses 17 Maret 2025).

prinsip keadilan antarwilayah (equity).¹⁹ Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kajian mendalam terhadap bagaimana kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan diimplementasikan di Kabupaten Kepahiang dan sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika kebijakan publik di level daerah, mengevaluasi praktik pelaksanaannya, serta memberikan masukan konstruktif guna penyempurnaan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier merupakan kerangka yang banyak digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan publik. Teori ini menekankan tiga kelompok variabel utama, yakni karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengarahkan pelaksanaan, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Pertama, karakteristik masalah (*tractability of the problem*) berkaitan dengan tingkat kesepakatan tujuan, kompleksitas teknis, jumlah aktor yang terlibat, dan perbedaan kondisi geografis. Dalam konteks Kabupaten Kepahiang, pemerataan infrastruktur pendidikan tergolong kompleks karena melibatkan banyak pihak, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan antarwilayah. Kedua, kemampuan kebijakan (*ability of the statute to structure implementation*) berkaitan dengan kejelasan tujuan, legitimasi lembaga pelaksana, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme koordinasi dan pengawasan. Hal ini penting untuk melihat apakah kebijakan pendidikan daerah memiliki struktur implementasi yang efektif. Ketiga, kondisi eksternal (*non-statutory variables*) meliputi dukungan politik, keterlibatan masyarakat, stabilitas daerah, serta kapasitas birokrasi pelaksana.²⁰

Penerapan teori ini dalam penelitian relevan untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Kepahiang, khususnya terkait pemerataan infrastruktur. Dengan menggunakan indikator dari ketiga variabel tersebut, dapat diidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, baik dari sisi fisik seperti ruang kelas, sarana pembelajaran, dan akses internet, maupun dari sisi non-fisik seperti partisipasi masyarakat dan dukungan birokrasi. Dengan demikian, teori Mazmanian dan Sabatier menjadi landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu menjawab ketimpangan infrastruktur pendidikan dan memberikan arah bagi rekomendasi perbaikan di masa depan.²¹

¹⁹ Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," n.d.

²⁰ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis" "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>."

²¹ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis" "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework," *Journal of Public Administration Studies* 005, no. 01 (2020): 33–38, <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>."

Beberapa penelitian terdahulu memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan dan implikasinya terhadap pemerataan infrastruktur. Penelitian tentang implementasi program *Mappadeceng* di Kabupaten Bulukumba (2021) menunjukkan bahwa meskipun program berjalan cukup baik, hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan koordinasi lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat.²² Penelitian lain mengenai kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Minahasa Tenggara (2022) menemukan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi, namun masih perlu perbaikan pada aspek pengusulan formasi guru serta pengawasan kebijakan untuk mendukung pemerataan infrastruktur.²³ Sementara itu, sebuah disertasi tentang transformasi manajemen infrastruktur pendidikan di Indonesia (2023) menekankan bahwa pembaruan manajemen infrastruktur merupakan kebutuhan strategis nasional dalam mewujudkan pemerataan layanan, khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.²⁴

Selain itu, penelitian-penelitian dalam jurnal bereputasi turut memperkuat temuan tersebut. Artikel tentang implementasi kebijakan pemerataan mutu pendidikan di daerah 3T (2024) menegaskan bahwa meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program, kendala di lapangan masih didominasi keterbatasan sarana, prasarana, serta pasokan listrik.²⁵ Studi mengenai implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia (2021) mengungkapkan bahwa tantangan besar muncul terutama pada masa pandemi COVID-19, sehingga adaptasi kebijakan serta kerjasama pusat-daerah menjadi kunci pemerataan infrastruktur.²⁶ Sementara itu, analisis tentang kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan (2020) menemukan bahwa meskipun zonasi dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan akses, implementasinya belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding manfaat yang diharapkan.²⁷

Penelitian ini diarahkan oleh beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang? Kedua, bagaimana kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan yang ada di wilayah tersebut, baik dari segi

²² Tri Cahyo Nugroho, "Implementasi Kebijakan Program Gerakan 'Mappadeceng' Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Soppeng," 2021.

²³ Meysi Christi Rolos, Johny H Posumah, and Very Y Londa, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara.," no. 113 (n.d.).

²⁴ Kusuwa Wijayanto. 2023. Transformasi Manajemen Infrastruktur Pendidikan dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Disertasi. IAIN Surakarta (<https://eprints.iain-surakarta.ac.id/4379/1/Kusuwa%20Wijayanto.pdf>)

²⁵ Alfariq Ramadani and Roha Purnama Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* 10, no. 1 (August 30, 2024): 40–49.

²⁶ Safrida -, Nila Safrida, and Muhammad Muhammad, "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Aceh Barat," *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 2 (December 29, 2021): 71–80.

²⁷ Syamsul Edi, "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan," n.d.

distribusi, kualitas, maupun aksesibilitas? Ketiga, bagaimana implikasi dari kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan terhadap upaya pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan terkait dengan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang, mendeskripsikan kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut, serta menjelaskan implikasi dari kebijakan pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan dan dampaknya terhadap pemerataan infrastruktur di Kabupaten Kepahiang. Lokasi penelitian ditetapkan pada tiga SMP Negeri yang dipilih secara purposif, yaitu di Kecamatan Kepahiang, Tebat Karai, dan Ujan Mas, dengan pertimbangan keterwakilan wilayah dan variasi kondisi infrastruktur. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3–6 bulan (April–September 2025), meliputi pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan.

Tabel 3.1 Sebaran SMPN di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025.²⁸

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			ISO		Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	9001:2000	9001:2008	
1	Kec. Kepahiang	5	2	5	1	1	0	0	7
2	Kec. Bermani Ilir	7	0	1	1	4	0	0	7
3	Kec. Kaba Wetan	3	0	0	2	1	0	0	3
4	Kec. Muara Kemumu	3	0	0	0	3	0	0	3
5	Kec. Tebat Karai	3	0	1	2	0	0	0	3
6	Kec. Ujan Mas	3	0	2	0	1	0	0	3
7	Kec. Seberang Musi	2	0	0	0	2	0	0	2
8	Kec. Merigi	1	0	0	1	0	0	0	1
Total		27	2	9	7	12	0	0	29

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam (dengan pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat), observasi lapangan (melihat langsung kondisi bangunan, fasilitas listrik, sanitasi, dan internet), serta studi dokumentasi (RKAS, profil sekolah, laporan DAK, dan kebijakan daerah terkait). Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dengan kebijakan pendidikan dan kondisi infrastruktur.²⁹ Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data (menyaring dan merangkum data relevan), penyajian data (dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks), dan penarikan kesimpulan

²⁸ Daftas Sekolah.Net. Daftar Sekolah SMP di KabupatenKepahiang Bengkulu Tahun 2025, 2025 <https://daftarsekolah.net/> (diakses tanggal 17 Maret 2025)

²⁹ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit" 4 (2013).

yang diverifikasi untuk memastikan keabsahan temuan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang.³⁰

HASIL

1. Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Regulasi Pendidikan

Kebijakan pendidikan daerah di Kabupaten Kepahiang umumnya sudah selaras dengan kebijakan nasional, meski belum sepenuhnya merata (sekitar 80% menurut salah satu informan). Aturan teknis pelaksanaan kebijakan, seperti juknis DAK Fisik Pendidikan, dinilai jelas dan mudah dipahami, sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah dalam implementasi. Regulasi daerah seperti Perbup No. 23/2022, Perbup No. 5/2023, dan Perbup No. 17/2024 menjadi dasar hukum dalam penyediaan sarana prasarana. Namun, di tingkat sekolah, penerapan SOP turunan masih bervariasi sehingga konsistensi pelaksanaan belum sepenuhnya seragam.³¹

b. Anggaran Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan diupayakan minimal 20% dari APBD dan didukung oleh peningkatan dana DAK, dari Rp 5 miliar pada 2023 menjadi Rp 15 miliar pada 2024. Serapan anggaran dinilai efisien dan tepat waktu. Meski begitu, pembangunan infrastruktur belum merata karena sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60 orang belum bisa memperoleh bantuan DAK. Observasi di lapangan juga menunjukkan masih adanya sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang kelas, WC, serta ruang guru.³²

c. Koordinasi Antar-Stakeholder

Koordinasi antar pihak Dinas Pendidikan, sekolah, komite, masyarakat, hingga lintas sektor seperti PUPR berjalan cukup baik, meskipun berbeda tingkat intensitasnya di setiap sekolah. Ada sekolah yang rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua dan masyarakat, ada juga yang lebih jarang. Perbedaan ini menunjukkan perlunya standarisasi sistem koordinasi agar kebijakan dapat diterapkan lebih merata.³³

2. Kondisi Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Implementasi Infrastruktur Pendidikan

Implementasi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah berjalan, namun belum sepenuhnya merata dari sisi kualitas. Jumlah ruang kelas secara umum sudah mencukupi, tetapi masih terdapat sekolah yang ruang kelasnya rusak parah

³⁰ Agusta, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif."

³¹ Object, *KEBIYAKAN PENDIDIKAN PROVINSI (SLTA DAN SMK) DAN ANALISIS SWOT DI KALIMANTAN TIMUR*.

³² Darif et al., *DAMPAK KEBIJAKAN SK MENPAN RB NOMOR 149 TAHUN 2023 DI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022*.

³³ Hudodo and Naway, *PARTISIPASI STAKEHOLDER PENDIDIKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO*.

sehingga tidak dapat digunakan, seperti di SMPN 3 Kepahiang. Sebaliknya, ada juga sekolah yang memiliki ruang kelas memadai namun tidak digunakan karena jumlah siswa terbatas. Dari sisi fasilitas dasar, sebagian besar sekolah sudah memiliki air, listrik, toilet, dan internet, meskipun kualitasnya bervariasi. Beberapa sekolah masih menghadapi keterbatasan air bersih, jaringan internet yang tidak stabil, serta fasilitas yang jarang diperbarui. Penyaluran bantuan infrastruktur telah menjangkau berbagai wilayah, termasuk desa, namun belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi mendesak di lapangan sehingga masih ada sekolah yang tertinggal.³⁴

b. Aspek Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Distribusi fasilitas pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Kepahiang umumnya sudah cukup baik, meskipun masih ada kendala di wilayah terpencil dengan akses geografis sulit. Dari segi mutu, infrastruktur sekolah di desa dan kota belum seimbang; bahkan beberapa sekolah di desa lebih terawat dibanding sekolah di pusat kota. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sarana prasarana juga masih rendah karena banyak fasilitas yang belum layak pakai, seperti aula, mushola, dan perabot kelas. Hal ini menunjukkan perlunya pemerataan tidak hanya pada jumlah, tetapi juga pada kualitas infrastruktur.³⁵

c. Aspek Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Kepahiang dinilai cukup baik karena sebagian besar siswa menempuh jarak relatif dekat, sekitar 1–3 kilometer dari rumah ke sekolah. Moda transportasi seperti jalan kaki, sepeda motor, dan transportasi umum tersedia dan dapat digunakan siswa. Namun, wilayah tertentu seperti Air Punggur dan Damar Kencana masih mengalami kesulitan akses, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan yang berlumpur. Beberapa sekolah memiliki lokasi strategis, seperti SMPN 2 Ujan Mas yang berada di tepi jalan lintas, sementara SMPN 3 Kepahiang berada di gang kecil yang menyulitkan mobilitas.³⁶

3. Implikasi Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Pemerataan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Infrastruktur Pendukung

Ketersediaan listrik, air bersih, dan internet menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak. Di Kabupaten Kepahiang, listrik umumnya sudah tersedia dan berfungsi baik di semua sekolah, meskipun ada perbedaan kualitas antar wilayah. Air bersih juga sudah ada, tetapi masih ditemukan kendala pada saluran distribusi dan kelancarannya, sehingga beberapa sekolah mengandalkan sumur bor atau mesin sanyo. Sementara itu, akses internet belum merata. Beberapa sekolah sudah memiliki jaringan yang stabil, tetapi ada juga yang mengalami kendala, terutama saat digunakan untuk ujian berbasis komputer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

³⁴ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

³⁵ Mubarak, "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG."

³⁶ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

infrastruktur dasar tersedia, pemerataannya masih perlu ditingkatkan agar kualitas belajar lebih optimal.³⁷

b. Aspek Peran Masyarakat dan Stakeholder

Keterlibatan masyarakat, khususnya wali murid, dalam mendukung sekolah cukup baik di beberapa satuan pendidikan, seperti melalui rapat rutin atau forum komite. Namun, peran stakeholder eksternal seperti lembaga swasta, organisasi masyarakat, atau dunia usaha masih minim. Kolaborasi lintas sektor ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kemitraan agar pembangunan pendidikan lebih partisipatif dan berkelanjutan.³⁸

c. Aspek Efektivitas Penggunaan dan Dampak Infrastruktur Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan umumnya telah dimanfaatkan dengan baik oleh guru dan siswa. Pemanfaatan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kehadiran dan semangat belajar. Namun, dampaknya terhadap hasil akademik tidak selalu konsisten. Misalnya, ada sekolah dengan sarana lengkap tetapi hasil belajar tidak meningkat signifikan, sementara sekolah lain mengalami peningkatan mutu pembelajaran setelah fasilitas diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur harus diiringi dengan manajemen pembelajaran dan strategi pengajaran yang baik agar memberikan dampak nyata terhadap prestasi siswa.³⁹

PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan mengenai infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Regulasi Pendidikan

Regulasi pendidikan di Kabupaten Kepahiang umumnya sudah selaras dengan kebijakan nasional, meski tingkat keselarasan baru sekitar 80% sehingga masih perlu harmonisasi substansi dan teknis. Kebijakan nasional telah dielaborasi melalui dokumen daerah seperti RPJMD dan Renstra, namun implementasi regulasi teknis seperti juknis dan SOP belum seragam di tiap sekolah. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi kapasitas tata kelola daerah, karena meskipun pusat menyediakan kerangka regulasi dan dana, kesiapan teknis daerah masih timpang. Kebijakan daerah dinilai berkelanjutan dan adaptif sesuai kebutuhan lokal, sejalan dengan prinsip bottom-up planning. Berdasarkan teori pemerataan, regulasi pendidikan harus mampu mewujudkan distribusi sumber daya secara adil,

³⁷ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

³⁸ Hudodo and Naway, *PARTISIPASI STAKEHOLDER PENDIDIKAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO*.

³⁹ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

sehingga penguatan regulasi teknis dan kapasitas manajerial sekolah menjadi kunci untuk tercapainya pemerataan pendidikan yang substantif.⁴⁰

b. Aspek Anggaran Pendidikan

Aspek anggaran menjadi pilar utama dalam pemerataan infrastruktur pendidikan, di mana Kabupaten Kepahiang telah mengalokasikan anggaran mendekati 20% dari APBD sesuai amanat nasional. Namun, sebagian besar pembiayaan operasional sekolah masih bergantung pada dana BOS, menunjukkan keterbatasan kemandirian fiskal daerah. Serapan anggaran dinilai efisien dan tepat waktu sesuai UU No. 17 Tahun 2003, tetapi perencanaan berbasis kebutuhan riil belum optimal sehingga distribusi antar sekolah belum merata. Ketimpangan terlihat dari adanya sekolah yang masih kekurangan sarana dasar, sementara sekolah lain sudah mendapat rehabilitasi melalui DAK. Hal ini menandakan evidence-based budgeting dan kapasitas kelembagaan daerah masih perlu diperkuat agar alokasi anggaran lebih adil, tepat sasaran, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik.⁴¹

c. Aspek Koordinasi Antar-Stakeholder

Koordinasi antar-stakeholder di Kabupaten Kepahiang telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan, meskipun intensitasnya bervariasi. Partisipasi berbagai pihak pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, sekolah, dan masyarakat selaras dengan teori kolaborasi multipihak Bryson & Crosby serta teori partisipasi Bray, meski implementasi di sekolah masih belum merata. Pertemuan rutin antara sekolah dan wali murid menunjukkan praktik kemitraan yang baik, tetapi di beberapa sekolah koordinasi masih bersifat insidental. Koordinasi antar lembaga lintas sektor seperti PU dan PUPR juga sudah diterapkan, namun belum menjangkau seluruh sekolah. Sementara itu, pelibatan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta (PPP) belum optimal, sehingga diperlukan strategi untuk membangun kerangka kerja CSR dalam mendukung infrastruktur pendidikan di wilayah yang masih kekurangan.⁴²

d. Kesimpulan dengan Pendekatan Teori Mazmanian dan Sabatier

Implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan progres, namun belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh regulasi, anggaran, dan koordinasi stakeholder. Dari sisi regulasi, pemerintah daerah telah menyelaraskan kebijakan dengan aturan nasional, tetapi distribusi SOP dan juknis masih belum merata, sehingga komitmen dan kapasitas pelaksana belum optimal. Dari sisi anggaran, meski alokasi pendidikan mendekati

⁴⁰ Fauzi and Setiawati, *Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah Terpencil: Analisis APS, APK, dan APM terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, dan Reformasi Pengajaran*.

⁴¹ Sengaji and Asyik, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa*.

⁴² Hudodo And Naway, *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*.

20% APBD, distribusi infrastruktur antar sekolah masih timpang akibat lemahnya perencanaan berbasis kebutuhan dan keterbatasan akses ke program pusat seperti DAK. Dari sisi koordinasi, berbagai pihak telah dilibatkan, namun efektivitas partisipasi antarwilayah bervariasi, sementara kontribusi sektor swasta masih minim. Secara keseluruhan, meski ada komitmen dan dukungan formal, efektivitas implementasi masih terhambat oleh kapasitas pelaksana, perangkat regulasi teknis, dan koordinasi lintas sektor. Pemerataan infrastruktur pendidikan akan lebih tercapai jika ketiga variabel strategis tersebut diperkuat secara konsisten.⁴³

2. Kondisi pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Implementasi Infrastruktur Pendidikan

Implementasi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi tantangan serius terkait kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan. Jumlah ruang kelas secara administratif dinilai mencukupi, namun observasi lapangan memperlihatkan ketimpangan kualitas antar sekolah, seperti kerusakan parah di SMPN 3 Kepahiang. Ketersediaan fasilitas dasar air, sanitasi, listrik, dan internet sudah ada, tetapi konsistensi dan kualitasnya belum merata, sehingga memengaruhi proses pembelajaran. Sebaran bantuan infrastruktur juga belum konsisten, terlihat dari sekolah seperti SMPN 2 Ujan Mas yang menerima rehabilitasi sejak 2019, sementara SMPN 3 Kepahiang belum mendapat perhatian sejak 2004. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis kebutuhan riil (equity-based) dalam distribusi bantuan, agar pemerataan tidak hanya terlihat di data, tetapi benar-benar dirasakan di sekolah. Hal ini sejalan dengan teori pemerataan dan strategi pembangunan inklusif Bappenas dan Tilaar yang menekankan distribusi adil, berbasis kondisi objektif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan validitas data kebutuhan sekolah.⁴⁴

b. Aspek Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

Pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang mencerminkan sejauh mana keadilan akses pendidikan telah diwujudkan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek kualitas antarwilayah dan kepuasan pengguna. Rasio fasilitas per kecamatan relatif merata secara administratif, tetapi hambatan geografis di wilayah terpencil seperti Air Punggur dan Damar Kencana menunjukkan perlunya intervensi afirmatif sesuai Teori Keadilan Sosial Rawls, yang menekankan prioritas bagi pihak paling tertinggal. Mutu infrastruktur tidak selalu sejalan dengan lokasi, terbukti SMPN 3 Kepahiang di pusat kota justru lebih buruk dibandingkan SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas, sehingga distribusi harus berbasis kebutuhan nyata, bukan status geografis. Ketidakpuasan seluruh informan terhadap kondisi sarana pendidikan, termasuk rusaknya ruang kelas dan

⁴³ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

⁴⁴ Ridha, *DESENTRALISASI PENDIDIKAN (SEBAGI UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN)*.

ketiadaan fasilitas ibadah di SMPN 3, memperlihatkan adanya kegagalan dalam memenuhi prinsip keadilan struktural Rawls.⁴⁵

c. Aspek Aksesibilitas Pendidikan

Aksesibilitas merupakan elemen fundamental dalam pemerataan pendidikan, dan penelitian di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa meskipun secara umum akses fisik menuju sekolah sudah cukup baik, masih terdapat tantangan di wilayah tertentu dengan kondisi geografis dan jalan yang kurang memadai. Mayoritas siswa tinggal dalam radius 1–3 kilometer dari sekolah sesuai kebijakan zonasi, tetapi sebagian kecil tetap harus menempuh jarak lebih jauh karena keterbatasan sekolah di daerah terpencil, yang menurut Teori Pemerataan Adams menandakan belum tercapainya keadilan. Kualitas transportasi dinilai cukup memadai, namun hambatan di daerah seperti Air Punggur dan Damar Kencana menunjukkan pentingnya pemerataan infrastruktur jalan dan moda transportasi, sebagaimana ditekankan Tilaar dan Tilak bahwa akses pendidikan tidak hanya menyangkut lokasi sekolah, tetapi juga sarana pendukungnya. Perbedaan akses antar sekolah sampel SMPN 3 Kepahiang yang berada di dalam gang, SMPN 2 Tebat Karai dengan akses ideal, dan SMPN 2 Ujan Mas yang terletak di jalan lintas besar menunjukkan adanya disparitas meski dalam satu kabupaten.⁴⁶

d. Kesimpulan dengan Pendekatan Teori Mazmanian dan Sabatier

Berdasarkan penelitian, implementasi kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan komitmen pemerintah daerah melalui penyediaan ruang kelas dan fasilitas dasar. Namun, kualitas, distribusi, dan keberlanjutan infrastruktur belum merata. Dalam perspektif teori Mazmanian dan Sabatier, meskipun tujuan kebijakan jelas dan didukung secara formal, keterbatasan sumber daya, kondisi sosial-ekonomi, serta hambatan akses di wilayah terpencil mengurangi efektivitas implementasi. Hal ini menegaskan bahwa strategi yang dijalankan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan objektif. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan yang lebih akurat, peningkatan kualitas pelaksanaan, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan agar pemerataan infrastruktur pendidikan dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan.⁴⁷

3. Implikasi kebijakan pemerintah bidang pendidikan terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang

a. Aspek Infrastruktur Pendukung

Aspek infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, dan internet merupakan elemen vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian di Kabupaten Kepahiang

⁴⁵ Hakim, *PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*.

⁴⁶ Alfariq Ramadani and Putri, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3T Pemerintah Kota Batam."

⁴⁷ Mubarok et al., "Policy Implementation Analysis."

menunjukkan bahwa meskipun listrik sudah tersedia di hampir seluruh sekolah, kualitas dan kestabilannya belum seragam sehingga memerlukan jaminan keberlanjutan layanan. Air bersih juga ditemukan tersedia di sebagian besar sekolah, namun distribusi dan kelancarannya belum konsisten, sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan peserta didik, terutama terkait sanitasi. Kondisi yang paling timpang terlihat pada akses internet: sebagian sekolah seperti SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas telah memiliki jaringan yang memadai, sementara sekolah lain seperti SMPN 3 Kepahiang masih menghadapi gangguan serius, bahkan saat ujian daring. Ketimpangan ini berisiko memperlebar kesenjangan digital (digital divide) yang pada akhirnya memengaruhi kesetaraan akses pengetahuan modern. Sejalan dengan pandangan UNESCO, Tilaar, dan Bappenas, pemerataan infrastruktur pendidikan tidak hanya mencakup distribusi fisik, tetapi juga kualitas, fungsi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, meskipun sudah terdapat kemajuan, keterbatasan pada listrik, air bersih, dan internet di Kepahiang menegaskan perlunya perhatian lebih serius agar pemerataan infrastruktur pendukung benar-benar terwujud secara adil dan inklusif.

b. Aspek Peran Masyarakat dan Stakeholder

Penelitian di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung pendidikan seperti listrik, air bersih, dan internet masih menghadapi berbagai kendala. Listrik sudah tersedia di hampir semua sekolah, tetapi kualitas dan kestabilannya belum merata. Air bersih juga relatif ada, namun distribusinya sering tidak konsisten, sehingga mengganggu sanitasi dan kesehatan siswa. Permasalahan terbesar adalah akses internet yang timpang, di mana sebagian sekolah sudah memiliki jaringan stabil, sementara lainnya masih sangat terbatas hingga menghambat pelaksanaan ujian daring. Kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan digital, sehingga sejalan dengan pandangan UNESCO, Tilaar, dan Bappenas, pemerataan infrastruktur pendidikan di Kepahiang memerlukan perhatian lebih agar kualitas, fungsi, dan keberlanjutan layanan benar-benar terjamin secara adil dan inklusif.

c. Aspek Efektivitas Penggunaan dan Dampak Infrastruktur Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat pembelajaran telah dimanfaatkan secara efektif oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Observasi di SMPN 3 Kepahiang, SMPN 2 Tebat Karai, dan SMPN 2 Ujan Mas membuktikan bahwa fasilitas digunakan secara rutin dan mendukung kegiatan pembelajaran. Namun, pemanfaatan infrastruktur tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan hasil akademik. Data di SMPN 2 Tebat Karai dan SMPN 2 Ujan Mas menunjukkan bahwa meskipun fasilitas digunakan optimal, capaian ujian tidak mengalami peningkatan signifikan.

d. Kesimpulan dengan Pendekatan Teori Mazmanian dan Sabatier

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Kepahiang telah dilakukan, pemerataan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kejelasan tujuan, kapasitas pelaksana, dukungan eksternal, serta kondisi sosial-ekonomi. Dari aspek infrastruktur pendukung, ketersediaan listrik sudah merata, tetapi akses air bersih dan internet di wilayah terpencil masih terbatas. Pada aspek peran masyarakat dan stakeholder, partisipasi masih bersifat administratif dan minim kontribusi substantif dari dunia usaha maupun tokoh masyarakat. Sementara itu, efektivitas pemanfaatan infrastruktur belum maksimal karena belum ditopang oleh kualitas guru, manajemen sekolah, dan kurikulum yang relevan. Dengan demikian, pemerataan infrastruktur pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta, serta evaluasi berfokus pada kualitas dan kesetaraan pendidikan.⁴⁸

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan di Kepahiang menunjukkan perkembangan positif, meski pemerataan infrastruktur belum tercapai sepenuhnya. Regulasi selaras dengan kebijakan nasional, namun penerapan SOP di sekolah masih berbeda-beda. Anggaran mendekati 20% APBD, tetapi pemanfaatannya belum merata karena prioritas rehabilitasi lebih banyak pada sekolah tertentu. Koordinasi antar-stakeholder berjalan, namun partisipasi masyarakat dan swasta masih rendah. Berdasarkan teori Mazmanian dan Sabatier, tujuan dan dukungan fiskal sudah jelas, tetapi kapasitas teknis, perencanaan kebutuhan, dan keterlibatan lintas sektor masih menjadi kendala.⁴⁹ Infrastruktur pendidikan di Kepahiang meningkat dari sisi ruang kelas dan fasilitas dasar, tetapi pemerataannya masih terbatas, terutama di wilayah geografis sulit. Bantuan infrastruktur belum konsisten dan kualitas fasilitas antarwilayah berbeda, memengaruhi kepuasan guru dan siswa. Dari aspek akses, mayoritas siswa sesuai prinsip zonasi, namun sebagian terkendala jarak dan kondisi jalan buruk. Dengan kerangka Mazmanian dan Sabatier, kebijakan ini sudah memiliki tujuan dan dukungan formal, tetapi keterbatasan sumber daya, lemahnya perencanaan kebutuhan, dan ketidakmerataan sosial-ekonomi tetap menghambat pemerataan.⁵⁰ Kebijakan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kepahiang memberi hasil positif pada ketersediaan listrik, namun akses air bersih dan internet masih belum merata, terutama di wilayah terpencil. Partisipasi masyarakat ada meski terbatas, sementara keterlibatan stakeholder eksternal masih minim sehingga kemitraan publik-swasta perlu diperkuat. Infrastruktur sudah dimanfaatkan, tetapi dampaknya pada mutu pendidikan belum merata karena faktor guru, manajemen sekolah, dan metode pembelajaran. Berdasarkan Mazmanian dan Sabatier, strategi komprehensif dengan

⁴⁸ Mubarak et al., "Policy Implementation Analysis."

⁴⁹ Yanti et al., *Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵⁰ Mubarak, "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF SOSIOLOG."

tujuan jelas, penguatan kapasitas, keterlibatan multipihak, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan agar pemerataan pendidikan terwujud secara adil dan berdaya saing.⁵¹

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Oleh Ivanovich. *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*. N.D.
- Alfariq Ramadani, And Roha Purnama Putri. "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pemerataan Mutu Pendidikan Daerah 3t Pemerintah Kota Batam." *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 10, No. 1 (2024): 40–49. <https://doi.org/10.25299/Wedana.2024.13523>.
- Azis, H.Sulaiman L. "Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, Dan Kendalanya." *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman* 10, No. 2 (2019): 167. <https://doi.org/10.46339/Foramadiahi.V10i2.121>.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*. N.D.
- Darif, Muhamad, Encep Syaripudin, And Cucu Atikah. *Dampak Kebijakan Sk Menpan Rb Nomor 149 Tahun 2023 Di Lebak Tahun Anggaran 2022*. 15 (2024).
- Darling-Hammond, Linda. *Teacher Quality And Student Achievement: A Review Of State Policy Evidence*. N.D.
- Fauzi, Wildan Nuril Ahmad, And Yuli Setiawati. *Ketimpangan Akses Dan Kualitas Pendidikan Dasar Di Daerah Terpencil: Analisis Aps, Apk, Dan Apm Terhadap Infrastruktur, Distribusi Guru, Dan Reformasi Pengajaran*. 2024.
- Gaol, Rehabeam Lumban. "Pendekatan Strategis Dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Muna." *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, No. 2 (2025): 1194–206. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V7i2.1317>.
- Hakim, Lukman. *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2, No. 1 (2016).
- Hakim, Lukman Nul. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. 4 (2013).
- Hudodo, Saiful, And Fory Armin Naway. *Partisipasi Stakeholder Pendidikan Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato*. 2022.
- Maharani, Chika, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, And Arif Fadilla. "Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif." *Journal Of Macroeconomics And Social Development* 1, No. 3 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.47134/Jmsd.V1i3.199>.
- Marzuki, Ismail, And Lukmanul Hakim. "Evaluasi Pendidikan Islam." *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbawy* 1, No. 1 (2019). <https://doi.org/10.31000/Jkip.V1i1.1498>.
- Mubarak, Fadhil. "Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog: Meta Analisis Pendekatan Emile Durekheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, Dan Ibnu Khaldun." *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, No. 1 (2023): 11–33. <https://doi.org/10.33474/Ja.V5i1.19869>.
- Muhaemin, Nina Minawati. "Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?" *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2021): 201–22. <https://doi.org/10.36859/Jap.V4i1.269>.

⁵¹ Simatupang and Akib, "EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN DALAM KONTEKS DESENTRALISASI PEMERINTAHAN."

- Nani, Yacob Noho. "Peran Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan Secara Merata (Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, No. 3 (2021): 231. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>.
- Object, Object. *Kebijakan Pendidikan Provinsi (Slta Dan Smk) Dan Analisis Swot Di Kalimantan Timur*. N.D. Accessed April 18, 2025. <https://core.ac.uk/reader/287347140>.
- Raniyah, Qaulan. *Peran Teknologi Dan Pelatihan Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. 3 (2024).
- Ridha, Arif. *Desentralisasi Pendidikan (Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan)*. N.D.
- Rolos, Meysi Christi, Johny H Posumah, And Very Y Londa. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. No. 113 (N.D.).
- Sengaji, Intan, And Nur Fadrih Asyik. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa*. 7 (2018).
- Simatupang, Patar, And Haedar Akib. "Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 2, No. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>.
- Subair, Ahmad. *Sejarah Pendidikan Indonesia: Sebuah Refleksi*. No. 5 (2024).
- Suprasetya, Gatot. *Optimalisasi Tata Kelola Pembangunan Di Daerah Otonomi Baru (Dob) Papua Guna Menjaga Keutuhan Nkri*. N.D.
- Tashakkori, Abbas, And Charles Teddlie. *Sage Handbook Of Mixed Methods In Social & Behavioral Research (2nd Edition)*. N.D.
- Yanti, Annisa Darma, Muhammad Syaifudin, Agus Tino Mulio, Doni Hendra, And Elly Marlina. *Evaluasi Kebijakan Pendidikan : Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Keadilan Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. N.D.
- Zafitri, Elfira, Wahida Asni, And Rizki Ananda. *Peningkatan Akses Mutu Dan Pemerataan Pendidikan*. 09 (2024).